

BAB I

PENDAHULUAN

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Badan POM melaksanakan 5 (lima) dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nawacita terutama agenda ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai acuan untuk melaksanakan program prioritas tersebut, Badan POM telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut pada Renstra Eselon I dan Renstra unit kerja. Renstra Biro Kerjasama Luar Negeri telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.05.15.0614 tanggal 5 Mei 2015. Dokumen renstra tersebut memuat indikator kinerja dan target yang diurai per-tahun.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renstra, Biro Kerjasama Luar Negeri dituntut menerapkan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja memuat penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra dan perjanjian kinerja termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang digunakan dengan hasil dan manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016 dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016 juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri

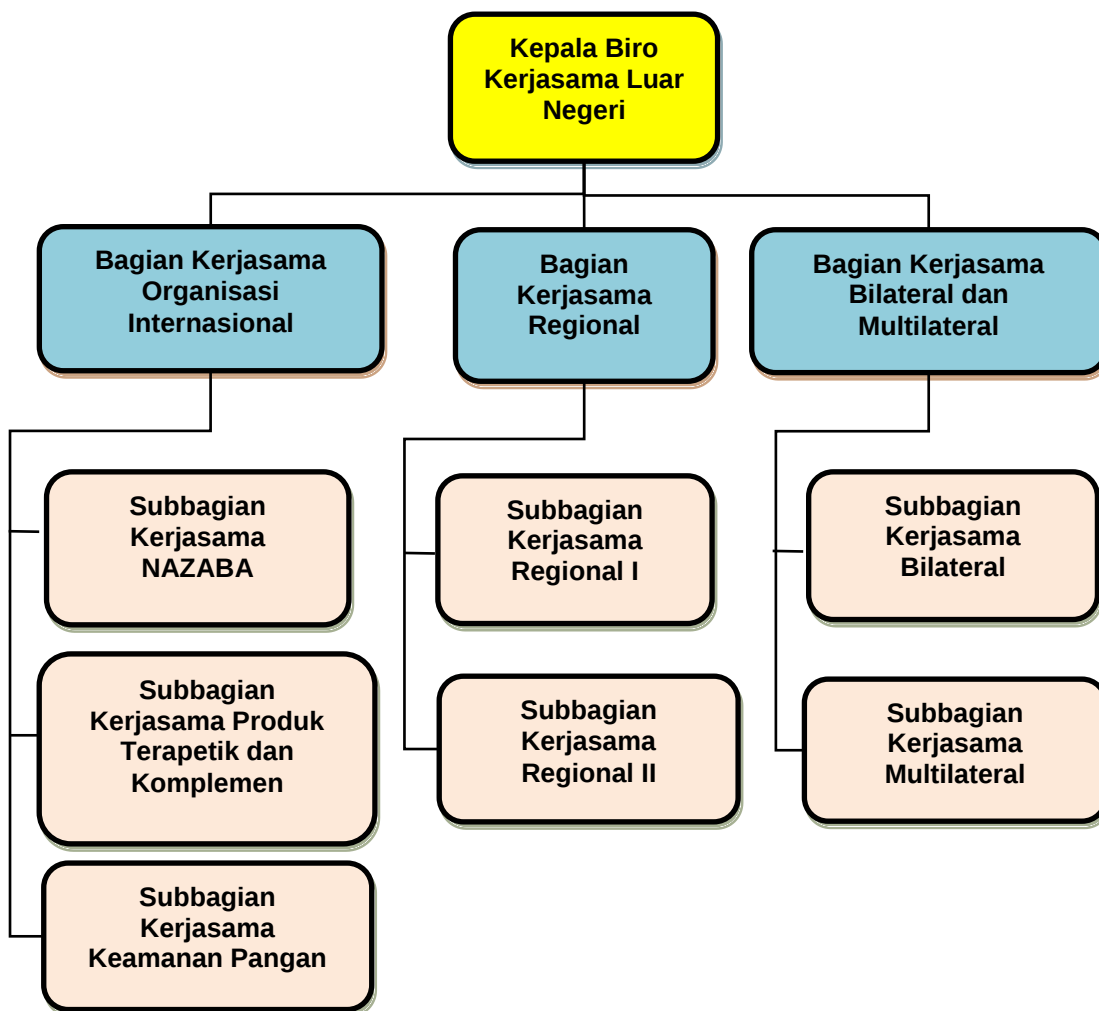
1.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Biro Kerjasama Luar Negeri selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.2. Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama Luar Negeri

BPOM berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Biro Kerjasama Luar Negeri sebagai salah satu unit penunjang di BPOM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.



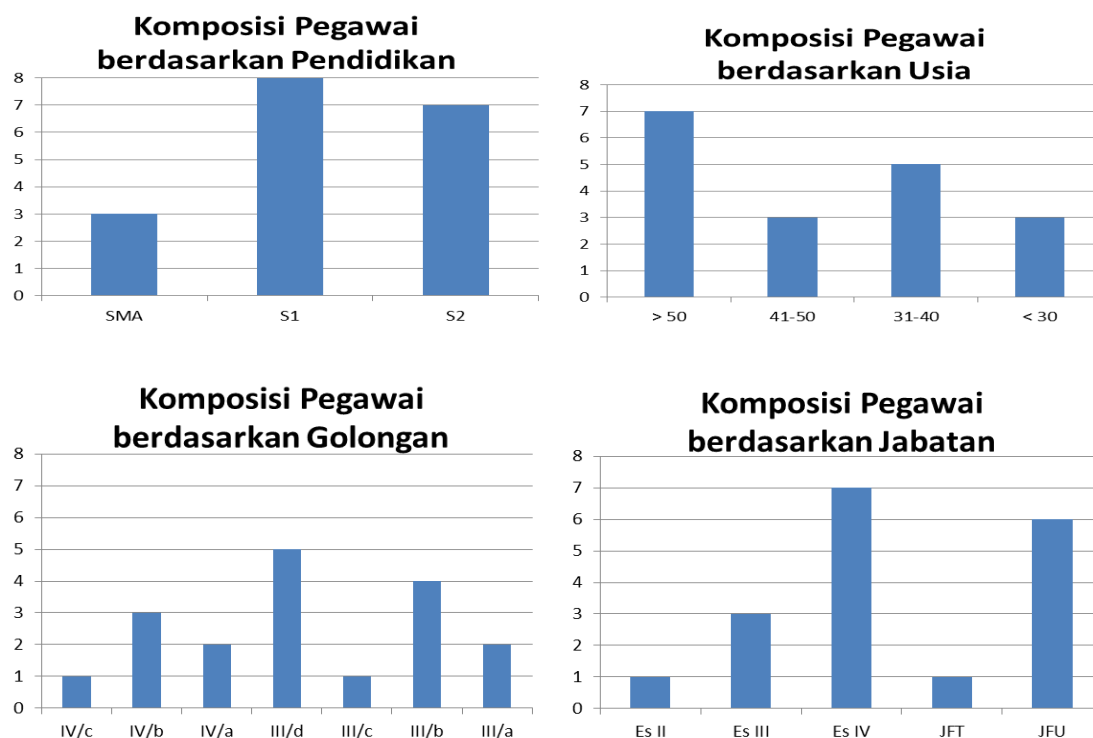
Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerjasama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kerjasama Luar Negeri, dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Biro Kerjasama Luar Negeri berada di bawah Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama internasional yang berkaitan dengan tugas Badan POM. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral;
- b. Pelaksanaan kegiatan kerjasama regional;
- c. Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional

1.3. Keragaman SDM Biro Kerjasama Luar Negeri

Data per 31 Desember 2016, jumlah pegawai Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM seluruhnya adalah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, 3 (tiga) Kepala Bagian, 7 (tujuh) Kepala Sub Bagian dan 8 (sembilan) orang staf Biro Kerjasama Luar Negeri. Gambaran SDM Biro Kerjasama Luar Negeri berdasarkan pendidikan, usia, golongan dan jabatan dapat digambarkan seperti Gambar 2.



Gambar 2. Gambaran SDM Biro Kerjasama Luar Negeri berdasarkan Pendidikan, Usia, Golongan dan Jabatan

1.4. Potensi dan Permasalahan

Globalisasi merupakan perubahan interaksi manusia secara luas yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan transportasi yang sangat cepat. Dampak tersebut mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya kerjasama di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. FTA membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal maupun pangan mengandung bahan berbahaya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi dan kesehatan.

Dampak globalisasi pada pembangunan ekonomi, dapat membuka peluang yang memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang bergabung dalam perjanjian FTA. Hal ini juga membuka peluang bagi produk obat dan makanan negara anggota FTA untuk masuk ke Indonesia. Masuknya produk perdagangan bebas tersebut, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat dan makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Perdagangan bebas juga membawa dampak pada penurunan derajat kesehatan yang dipicu dengan oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan. Untuk itu, masyarakat perlu proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi obat dan makanan tersebut.

Badan POM menyadari dalam pengawasan obat dan makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Badan POM mengembangkan kerjasama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri. Badan POM telah berperan aktif dalam forum bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional, seperti ASEAN, WHO, Codex Alimentarius Commission, APEC, Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Co-operation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization (Interpol), Commission Narcotics Nation (CND), dan lain lain. Jejaring kerjasama ini perlu penguatan karena karena belum semuanya berjalan efektif. Tantangan kedepan, Badan POM harus membuat terobosan untuk memperkuat kemitraan dengan stakeholder terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

Berkaitan dengan tugas-tugas yang secara langsung ditangani oleh Biro KSLN, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan koordinasi kerja sama luar negeri antara lain:

- a. Hubungan dan kerja sama bilateral, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan European Union mengusulkan konsep *free trade agreement* dalam bentuk *Framework Agreement Trade and Investment Council* (TIC) dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).
- b. Hubungan dan kerja sama regional, mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan perjanjian *Free Trade Area ASEAN+1 FTA* (AC-FTA, AJCEP, AANZ-FTA, AI-FTA, AK-FTA), serta perintisan perluasan kerjasama ASEAN dengan 6 mitra *partner* ASEAN (China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand dan India) dalam forum RCEP menjadi satu forum tunggal yang akan berisi 16 negara.
- c. Hubungan dan kerja sama multilateral/organisasi internasional, konsep *free trade* dalam WTO.

Konsep kawasan bebas perdagangan yang diusulkan oleh negara-negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara masing-masing dan juga kawasan regional terkait. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar bilateral, regional maupun multilateral tersebut begitu juga sebaliknya. Untuk itu, Badan POM di masa yang akan datang tidak hanya menghadapi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan di kawasan Indonesia, namun juga mempunyai tantangan dalam meningkatkan daya saing industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri agar mampu bersaing di pasar Indonesia maupun pasar internasional.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Biro Kerjasama Luar Negeri 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2016.
- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Laporan Kinerja tahun 2016.
- 4) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 memberikan amanat bahwa pembangunan kesehatan dan gizi bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dan gizi tersebut, perlu dilakukan peningkatan pengawasan obat dan makanan. Hal tersebut dituangkan dalam Visi dan Misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan POM cq. Biro Kerjasama Luar Negeri. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*) Badan POM. Rencana pencapaian tujuan strategis Badan POM lebih lanjut dituangkan dalam rencana strategis (Renstra).

VISI	MISI	TUJUAN
•Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	•Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; •Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; •Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM	•Meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan aman •Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal, dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2015, Badan POM telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Badan POM Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan/pedoman bagi setiap unit organisasi eselon I, satuan kerja dan unit organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dalam menyusun Renstra Tahun 2015-2019, dokumen perencanaan tahunan dan sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan POM. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.04.2.21.04.15.1986 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan POM Tahun 2015-2019.

Untuk mendukung tugas utama serta fungsi Badan POM, dan sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2015 dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.04.2.21.04.15.1986 Tahun 2015 tersebut, Biro Kerjasama Luar Negeri menyusun rencana strategis dan program kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.05.15.0614 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015-2019, Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.05.15.0615 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015-2019, Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.12.15.1431 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM Tahun 2016, dan Keputusan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor HK.04.2.21.12.16.008 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Kerjasama Luar Negeri Badan POM Tahun 2016.

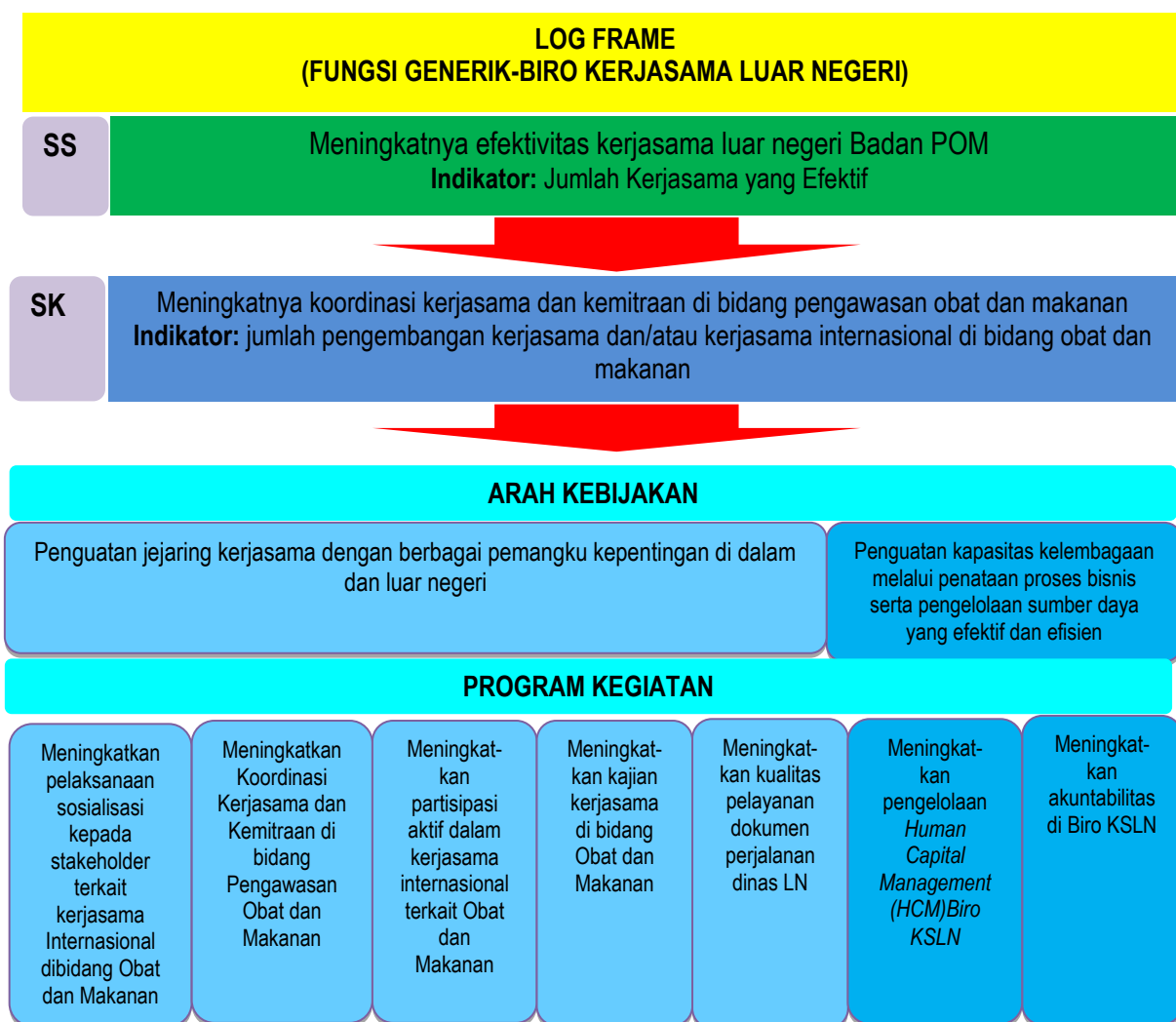
Biro Kerjasama Luar Negeri mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas utama Sekretariat Utama pada **“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya”** dengan sasaran program **“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama”**. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Biro Kerjasama Luar Negeri menyusun sasaran kegiatan yaitu **“Terselenggaranya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan”**, dengan indikator kinerja utama yaitu **jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan**.

Dengan mempertimbangkan aspek strategis, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta sasaran strategis, Biro Kerjasama Luar Negeri telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai pada periode tahun 2015-2019 seperti pada Tabel.1.

Tabel 1. Target Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015-2019

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target (dokumen)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan	25	28	31	34	37
Kerangka Pendanaan (Rp, Milyar)		5,6	6,0	7,0	7,0	8,0

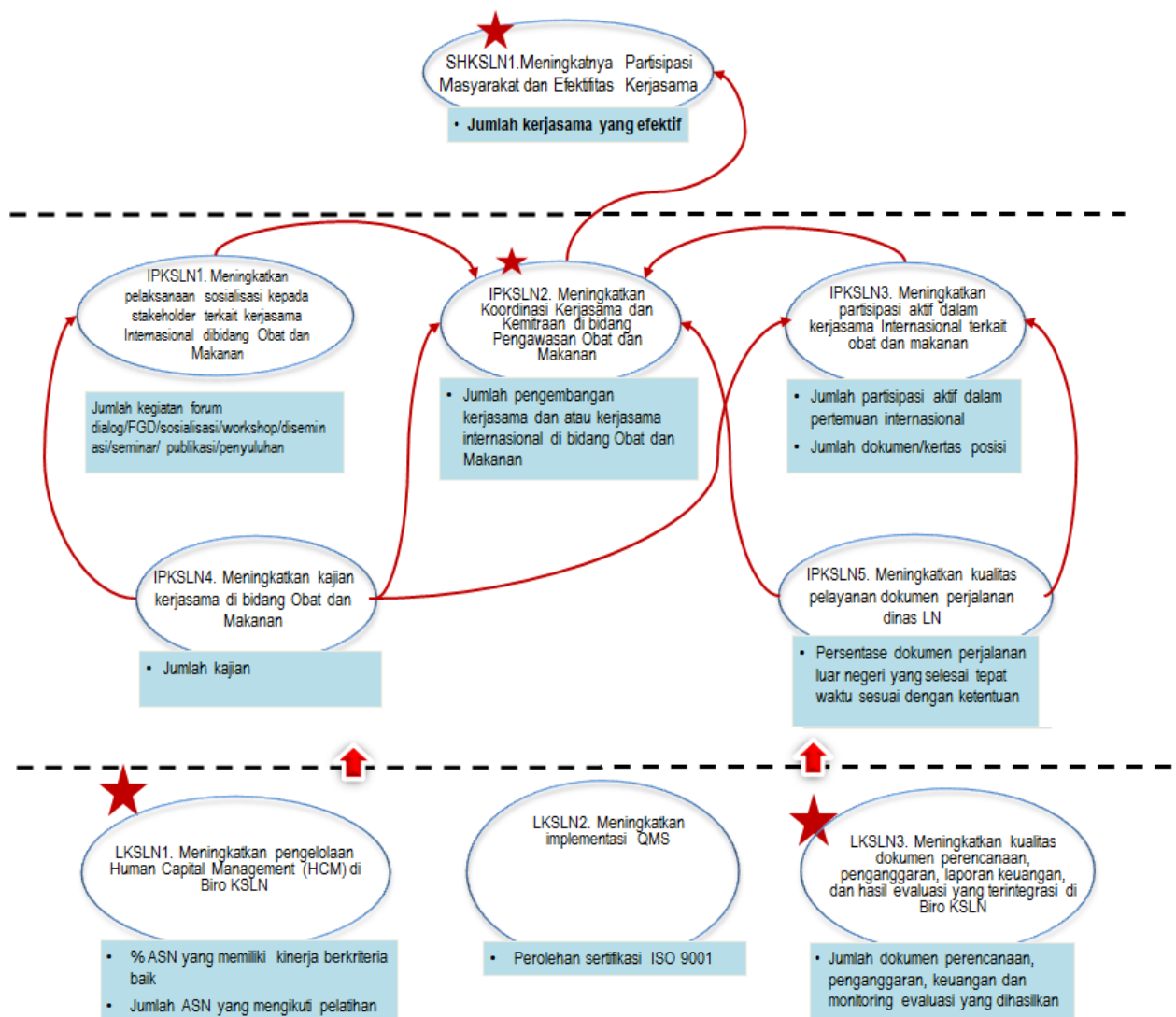
Biro Kerjasama Luar Negeri sebagai *focal point* dalam menyelenggarakan koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dituntut untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan POM. Untuk itu, Biro Kerjasama Luar Negeri menetapkan arah kebijakan dan program kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan (SK), Sasaran Program (SP) dan pada akhirnya menyumbang pencapaian Sasaran Strategis (SS) Sekretariat Utama yang digambarkan seperti pada Log Frame pada Gambar 3.



Gambar 3. Log Frame Fungsi-Fungsi Generik Biro Kerjasama Luar Negeri

Log Frame tersebut dituangkan pada Peta Strategi Biro Kerjasama Luar Negeri seperti pada Gambar 4. yang mencakup Sasaran Mutu ditingkat stakeholder (outcome), proses dan kapabilitas.

PETA STRATEGI BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI 2015-2019



Gambar 4. Peta Strategi Biro Kerjasama Luar Negeri

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016

Sasaran strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri Badan POM	Jumlah Kerjasama yang Efektif	28 kerjasama efektif	Rp.6.000.000.000
Meningkatnya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan	28 dokumen kerjasama	

Perjanjian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016, merupakan perjanjian Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dengan Sekretaris Utama (Lampiran 1) dengan indikator utama adalah Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan. Sesuai dengan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP), definisi operasional untuk indikator utama adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kerjasama luar negeri meliputi penjajagan (membuat telaah/kajian) kerjasama, penyusunan kesepakatan kerjasama, pelaksanaan kerjasama, seperti:
 - Kerjasama bilateral : Indonesia- Negara mitra, Badan POM - *Food and Drug Adminstration* (FDA) Negara lain, *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Korea International Cooperation Agency* (KOICA), *Ministry of Food Drug Safety* (MFDS), *Phamaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA), dll
 - Kerjasama regional : ASEAN, Regional Cooperation Economic Partnership (RCEP), ASEAN+1, ASEAN Sub Regional, APEC, dll
 - Kerjasama multilateral/organisasi internasional: WHO, WTO, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan lembaga internasional lainnya *International Narcotic Control Board* (INCB), *FAO*, *Organization of The Islamic Conference* (OIC), dll

- b. Kerja sama adalah kesepakatan internasional yang dituangkan dalam dokumen resmi (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman, Letter of Agreement, Arrangement, Memorandum Saling Pengertian, Record of Discussion) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM atau atas nama Kepala Badan POM

Untuk mewujudkan kinerja tersebut dan berdasarkan peta strategi Biro Kerjasama Luar Negeri, dirancang kegiatan seperti pada Tabel 3.

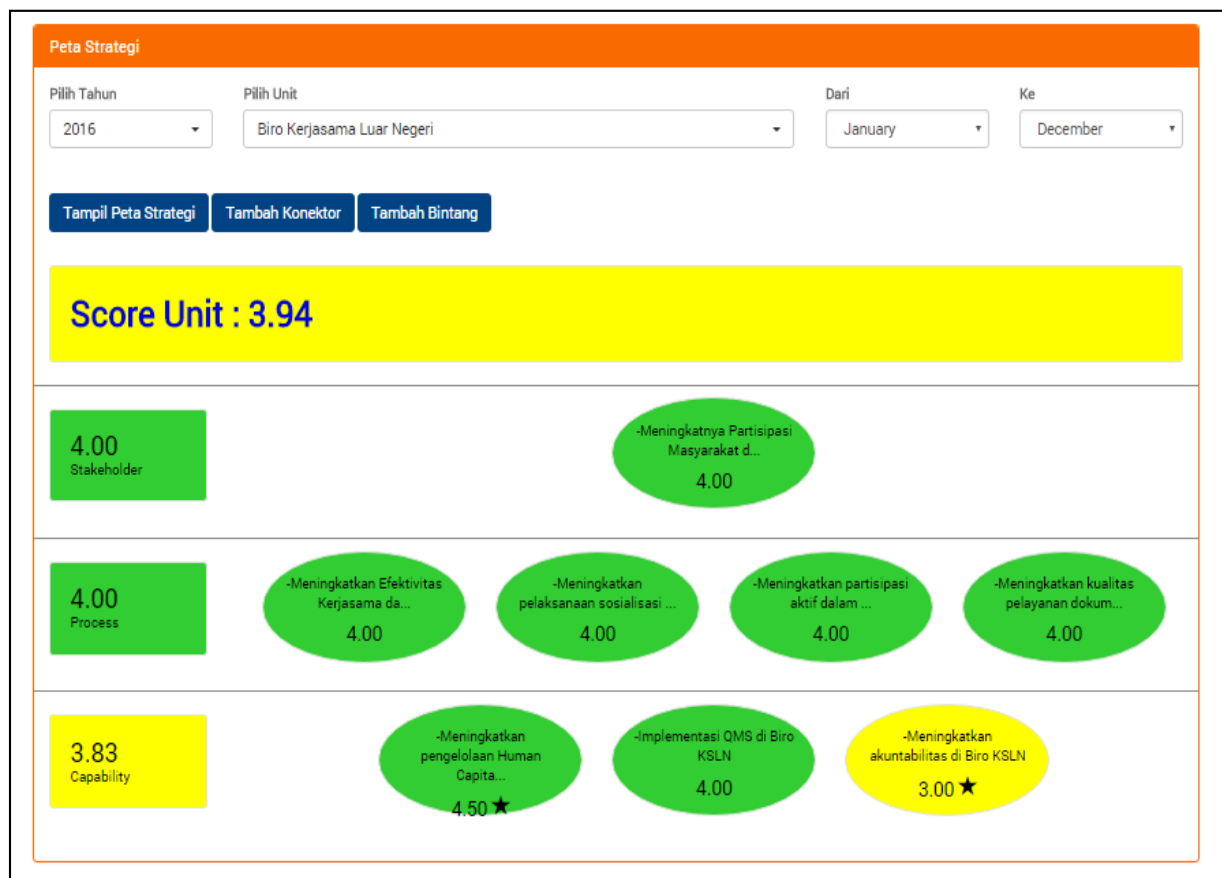
Tabel 3. Program Kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait kerjasama Internasional dibidang Obat dan Makanan	Jumlah kegiatan sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/workshop	Notifikasi Regulasi Teknis Obat dan Makanan dalam rangka Agreement WTO
			Drug and Food Control Newsletter
			Workshop isu-isu kerjasama regional
			Sosialisasi Penerapan Agreement TBT-WTO
			Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Organisasi Internasional
			Workshop ASEAN Economic Community (AEC) Post 2015
			Workshop Badan POM – Negara Mitra
Meningkatkan partisipasi aktif dalam kerjasama Internasional terkait obat dan makanan	Jumlah dokumen / kertas posisi	25 posisi	Perumusan Kertas/Dokumen Posisi dengan Negara Mitra
			Perumusan Kertas/Dokumen Posisi Kerjasama Regional
			Perumusan Kertas/Dokumen Posisi Kerjasama Organisasi Internasional
	Jumlah partisipasi aktif dalam pertemuan internasional	26 Pertemuan	Dukungan Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (WHO Global Monitoring and Surveillance SSFFC)
			Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Internasional di Dalam Negeri
			Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Internasional di Dalam Negeri
Meningkatkan kajian kerjasama di bidang Obat dan Makanan	Jumlah kajian	7 kajian	Kajian Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas LN	Persentase dok perjalanan luar negeri yang selesai tepat waktu	95 %	Perencanaan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM) di Biro KSLN	% ASN yang memiliki kinerja berkriteria baik	100 %	Operasional Biro Kerjasama Luar Negeri Alat Pengolah Data Biro Kerjasama Kerjasama Luar Negeri Peralatan Perkantoran Biro Kerjasama Luar Negeri
	% ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Kerjasama Luar Negeri
Implementasi QMS di Biro KSLN	Perolehan sertifikasi ISO 9001	1 Sertifikat	Penerapan RB/QMS/SPIP/LO di Biro KSLN dalam rangka Hubungan Kerjasama Luar Negeri
Meningkatkan akuntabilitas Biro KSLN	Nilai SAKIP dari BPOM	80	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan program kegiatan sudah cukup baik, ditandai dengan *score unit* pada sistem *e-performance* mencapai 3,94. Rata-rata capaian kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri pada level stakeholder dan proses dapat memenuhi target yang telah ditetapkan ditandai dengan score 4 (Baik), sedangkan capaian sistem akuntabilitas masih cukup dengan nilai *score* 3 karena belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Secara rinci, capaian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri per-kegiatan seperti pada Tabel 5

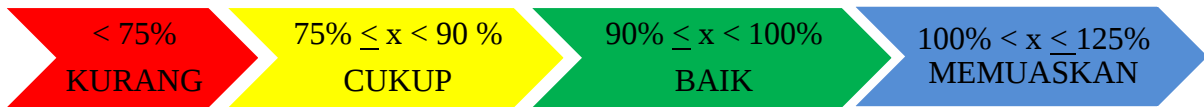
Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016

Sasaran strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian (%)
Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri Badan POM	Jumlah Kerjasama yang Efektif	28 kerjasama efektif	28	100%
Meningkatnya koordinasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan	28 dokumen kerjasama	28	100%
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait kerjasama Internasional di bidang Obat dan Makanan	Jumlah kegiatan sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/ workshop	15	100%
Meningkatkan partisipasi aktif dalam kerjasama Internasional terkait obat dan makanan	Jumlah dokumen / kertas posisi	25 posisi	25	100%
	Jumlah partisipasi aktif dalam pertemuan internasional	26 pertemuan	26	100%
Meningkatkan kajian kerjasama di bidang Obat dan Makanan	Jumlah kajian	7 kajian	7	100%
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas LN	Persentase dok perjalanan luar negeri yang selesai tepat waktu	95 %	95,03%	100%
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM) di Biro KSLN	% ASN yang memiliki kinerja berkriteria baik	100 %	100%	100%
	% ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	100%	100%
Implementasi QMS di Biro KSLN	Perolehan sertifikasi ISO 9001	1 Sertifikat	1 sertifikat	100%
Meningkatkan akuntabilitas Biro KSLN	Nilai SAKIP dari BPOM	80	69,84	87,30%

Untuk mengukur capaian kinerja atau capaian output organisasi digunakan nilai persentase dari realisasi capaian dibandingkan dengan rencana atau target capaian pada tahun 2016 sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\% \text{ Capaian Output} = \frac{\text{Realisasi Capaian}}{\text{Rencana Capaian}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengetahui baik atau buruknya pencapaian output suatu organisasi dapat mengacu pada kriteria pencapaian indikator sebagai berikut:



Capaian IKU Biro Kerjasama Luar Negeri mencapai 100 % sehingga masuk ke dalam kategori **BAIK**. Capaian yang masih cukup (87,30%) adalah sistem akuntabilitas di Biro Kerjasama Luar Negeri ditandai dengan pencapaian nilai SAKIP sebesar 69,84 dengan kategori Baik dari target nilai SAKIP Sangat Baik (A) dengan nilai minimal 80. Walaupun masih dalam kategori yang sama, nilai SAKIP Biro Kerjasama Luar Negeri menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 yang mendapat nilai 62,57.

Dalam rangka perbaikan sistem akuntabilitas dan meningkatkan efektivitas organisasi, Biro Kerjasama Luar Negeri melakukan monitoring kegiatan dan evaluasi internal setiap triwulan. Dari hasil evaluasi, kelemahan yang dirasakan dari perencanaan program tahun 2016 adalah komponen kegiatan disusun berdasarkan kesamaan kegiatan yang terdapat pada seluruh bagian dan sub bagian. Sedangkan dalam *e-performance*, penilaian berdasarkan komponen kegiatan yang mencerminkan kinerja suatu unit (bagian/sub bagian). Sehingga ketika monitoring kegiatan, sulit untuk mengidentifikasi unit yang belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Untuk perbaikan sistem akuntabilitas agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka perencanaan kegiatan Tahun 2017, komponen kegiatan disusun berdasarkan unit (bagian). Selain itu, tahun 2017 juga direncanakan untuk menyusun sistem informasi hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM untuk menyajikan data kerjasama luar negeri Badan POM yang komprehensif, akurat dan terkini. Sistem informasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder internal maupun eksternal seperti penyusunan MoU atau posisi kerjasama luar negeri dan sebagai bahan pertimbangan

penentuan arah kebijakan Badan POM khususnya dalam membangun kemitraan dan jejaring kerjasama.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Biro Kerjasama Luar Negeri, target jumlah pengembangan kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang obat dan makanan tahun 2016 adalah 28 dokumen. Pengukuran capaian 28 dokumen pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan merupakan gabungan dari dokumen posisi sebanyak 25 dokumen dan partisipasi aktif dalam pertemuan internasional 26 pertemuan sidang internasional (Tabel 6). Pertemuan Internasional dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumlah tersebut memberikan gambaran adanya *overlap* kinerja bahwa Biro Kerjasama Luar Negeri dapat ikut berpartisipasi aktif dan atau hanya memberikan masukan posisi terhadap forum kerjasama luar negeri tersebut.

Kegiatan penyusunan kajian ditujukan untuk memberikan bahan pertimbangan dan dukungan dalam penyusunan dokumen/kertas posisi kerjasama. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk pertukaran informasi dan meningkatkan pemahaman unit kerja dalam implementasi dan tindak lanjut kerjasama luar negeri. Dukungan pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri ditujukan sebagai dukungan pelaksanaan partisipasi aktif pertemuan dan kerjasama luar negeri.

Tabel 6. Capaian dokumen pengembangan kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang obat dan makanan tahun 2016

No	Dokumen pengembangan kerjasama/kerjasama	Dokumen Posisi	Partisipasi Aktif
1	MoU Badan POM dengan <i>National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipment</i> (NCEMMDME)-Kazakhstan	MoU Badan POM dengan NCEMMDME-Kazakhstan	MoU Badan POM dengan NCEMMDME-Kazakhstan
2	MoU Badan POM dengan <i>Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control</i> (SSUMDC)-Ukraina	MoU Badan POM dengan SSUMDC-Ukraina	MoU Badan POM dengan SSUMDC-Ukraina
3	Kerjasama JICA	Kerjasama JICA	
4	Kerjasama Maroko	Kerjasama Maroko	Kerjasama Maroko
5	Kerjasama Rusia	Kerjasama Rusia	Kerjasama Rusia
6	Kerjasama Korea	Kerjasama Korea	Kerjasama Korea
7	Kerjasama Amerika	Kerjasama Amerika	Kerjasama Amerika
8	Denmark		Denmark
9	IA-CEPA		IA-CEPA
10	Timor Leste	Timor Leste	
11	Kerjasama Selatan-Selatan (KSS)	KSS	
12	<i>Senior Official Meeting on Health Development</i> (SOMHD) Cluster 4	SOMHD Cluster 4	
13	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i> (APEC)	APEC	APEC
14	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	RCEP	RCEP
15	ACCSQ <i>ASEAN Cosmetic Committee</i> (ACC)	ACC	ACC
16	ACCSQ <i>Traditional Medicines and Health Supplement</i> (TMHS) Product WG	ACCSQ TMHS Product WG	ACCSQ TMHS Product WG
17	ACCSQ <i>Pharmaceutical</i> PWG (PPWG)	ACCSQ-TMHS Product WG	ACCSQ-TMHS Product WG
18	ACCSQ <i>Prepared Food Stuff</i> PWG (PFPWG)	ACCSQ -PFPWG	ACCSQ -PFPWG
19	ASEAN-Hongkong FTA	ASEAN-Hongkong FTA	ASEAN-Hongkong FTA
20	ASEAN - CHINA FTA	ASEAN - CHINA FTA	
21	ASEAN - Jepang (AJCEP)	AJCEP	
22	ASEAN-Australia-New Zealand (ANZ FTA)	ANZ FTA	ANZ FTA
23	Senior Official Meeting (SOM)	SOM	SOM
24	AEGFS		AEGFS
25	WTO: <i>Technical Barrier Trade</i> (TBT)-WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO TRIPS-WTO TF-WTO	TRIPS-WTO	TBT-WTO SPS-WTO TRIPS-WTO
26	World Health Organization: <i>World Health Assembly</i> (WHA), <i>Member States Mechanism on Substandard/Spurious/Falsely Labeled/Falsified/Counterfeit Medical Products</i> (MSM on SSFFC)	WHA MSM SSFFC	WHA, MSM SSFFC, UNGASS
27	<i>The Indian Ocean Rim Association</i> (IORA),	IORA	
28	Codex		Codex

Hingga akhir tahun 2016, Biro Kerjasama Luar Negeri telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Semua kegiatan terealisasi 100%. Kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Operasional Biro Kerjasama Luar Negeri telah tersusun laporan monitoring pelaksanaan kegiatan triwulan. Dokumen yang ditargetkan untuk di disusun tahun 2016 adalah 4 laporan (laporan monitoring pelaksanaan kegiatan triwulan) dan telah terlaksana 100%.
2. Pada kegiatan Perencanaan Hubungan Kerjasama Luar Negeri telah tersusun dokumen RKAKL tahun 2017 yang memaparkan informasi tentang kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dokumen yang ditargetkan untuk di disusun tahun 2016 adalah 1 dokumen dan telah terlaksana 100%.
3. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai di Biro Kerjasama Luar Negeri dilaksanakan sejalan dengan kegiatan perencanaan serta keberlanjutan dari reformasi birokrasi, Biro Kerjasama Luar Negeri mensinergikan program dan kegiatan peningkatan kinerja pegawai dalam membangun komitmen SDM Biro Kerjasama Luar Negeri dengan mewujudkan profesionalisme, produktivitas kerja yang baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai ditindaklanjuti dalam pemberian materi mengenai moralitas PNS serta pemberian pelatihan pembangunan manajemen SDM dalam mendorong motivasi kerja, meningkatkan etika dan disiplin, meningkatkan kemampuan bekerjasama dan koordinasi.

Jumlah SDM Biro Kerjasama Luar Negeri yang mengikuti kegiatan peningkatan kinerja sebanyak 20 orang. Target realisasi mencapai 100% dikarenakan ASN Biro Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2016 sebanyak 20 orang. ASN yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melakukan desiminasi kepada ASN lainnya untuk penularkan informasi kepada ASN lainnya. Sebagai tindak lanjut

peningkatan kinerja Pegawai di Biro Kerjasama Luar Negeri akan dilaksanakan peningkatan pengawasan, pemberian reward, serta akan dievaluasi efektifitas peningkatan kinerja.

4. Review Dokumen dalam rangka peningkatan penerapan RB/QMS/SPIP di Biro Kerjasama Luar Negeri telah sesuai dengan target dengan tercapainya re-sertifikasi ISO Tahun 2016 (100%). Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), review SOP dan Instruksi Kerja serta sosialisasi ISO secara kontinyu dan sesuai jadwal dilaksanakan dalam rangka peningkatan berkelanjutan penerapan QMS di Biro Kerjasama Luar Negeri.
5. Perumusan Kertas/ Dokumen Posisi dengan Negara Mitra telah menyusun 2 *Memorandum of Understanding* (MoU) dan 9 dokumen kerjasama bilateral dan multilateral. MoU yang berhasil ditandatangani pada tahun 2016 adalah Kerjasama antara Badan POM dengan *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipment* (NCEMMDME)-Kazakhstan, dan *Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control* (SSUMDC)-Ukraina. Dokumen posisi kerjasama bilateral dan multilateral lainnya meliputi kerjasama dengan Jepang (JICA), Maroko, Denmark, Rusia, Timor Leste, Korea, Amerika, TRIPS-WTO, *Trade Facilitation* (TF) WTO dan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).
6. Perumusan Kertas/ Dokumen Posisi Kerjasama Regional meliputi Dokumen Posisi Kerjasama *Senior Official Meeting on Health Development* (SOMHD) *Cluster 4, Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), ACCSQ ASEAN *Cosmetic Committee* (ACC), ACCSQ *Traditional Medicines and Health Supplement* (TMHS) *Product WG*, ACCSQ *Pharmaceutical PWG* (PPWG), ACCSQ *Prepared Food Stuff PWG* (PFPWG), ASEAN-Hongkong FTA, ASEAN - CHINA FTA, ASEAN - Jepang (AJCEP), dan ASEAN-Australia-New Zealand (ANZ FTA).
7. Perumusan Kertas/ Dokumen Posisi Kerjasama Organisasi Internasional meliputi Dokumen Posisi Kerjasama *World Health Assembly* (WHA), *Technical Barrier Trade* (TBT)-WTO, Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO, *Member States Mechanism on*

Substandard/Spurious/Falsely Labeled/Falsified/ Counterfeit Medical Products (MSM on SSFFC), *The Indian Ocean Rim Association* (IORA), dan Codex.

8. Kajian Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang berhasil disusun meliputi kajian kerjasama dengan *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipment* (NCEMMDME)-Kazakhstan, kerjasama dengan *Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control* (SSUMDC)-Ukraina, kerjasama *Trans Pasific Partnership* (TPP), kerjasama dengan kerjasama ASEAN, kerjasama *International Coalition Medicinal Regulatory Authority* (ICMRA), kerjasama *The Commission on Narcotic Drugs* (CND), dan kerjasama *The Food and Agriculture Organization* (FAO).
9. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (WHO Global Monitoring and Surveillance SSFFC) dilaksanakan di Jakarta berupa *Joint Regional Training Workshop Surveillance and Reporting of Substandard/Spurious/Falsely Labelled/Falsified/Counterfeit* (SSFFC) *Medical Product* yang dihadiri oleh 11 (sebelas) negara di kawasan Asia Tenggara.
10. Kegiatan hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan untuk membangun *networking* dengan NRA negara mitra luar negeri dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan dan melakukan kerjasama teknis dalam bentuk pelatihan atau tukar menukar informasi. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk menghadiri forum-forum kerjasama internasional, regional dan bilateral yang diselenggarakan di luar negeri. Pada tahun 2016, Biro Kerjasama Luar Negeri telah melaksanakan kunjungan dan pertemuan internasional sebanyak 26 forum yang meliputi penandatanganan MoU dengan Ukraina dan Kazakhsatan, peninjauan kerjasama dengan Maroko dan Rusia, kerjasama dengan Denmark, Amerik, Korea, IA-CEPA, kerjasama di lingkup regional seperti *Senior Economic Official Minister* (SEOM), *Senior Official Meeting* (SOM), APEC, RCEP, ACCSQ-ACC, ACCSQ-TMHS *Product WG*, ACCSQ-PPWG, ACCSQ -PPFWG, ASEAN-Hongkong FTA, AEGFS, dan ASEAN-Australia-New Zealand (ANZ FTA) serta kerjasama organisasi internasional yang meliputi Sidang WHA, TBT-WTO, SPS-WTO, TRIPS-WTO, MSM-SSFFC, UNGASS, dan Codex.

11. Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian untuk koordinasi antar interkementerian dan Pertemuan Internasional yang diselenggarakan di Dalam Negeri seperti ACCSQ -PPFWG, RCEP, IORA dan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).
12. Pembahasan notifikasi regulasi teknis obat dan makanan dalam rangka agreement WTO merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota WTO untuk menotifikasi peraturan terkait dengan perdagangan. Pada tahun 2016, Badan POM telah menotifikasi 3 rancangan atau peraturan Kepala Badan POM.
13. Penerbitan *Drug and Food Control Newsletter* merupakan salah satu sarana sosialisasi dan penyebaran informasi yang akurat dan terkini terkait isu terkini yang terkait obat dan makanan seperti isu-isu dan program terbaru dari unit-unit teknis di Badan POM, partisipasi Badan POM dalam pertemuan internasional, informasi kegiatan yang akan diselenggarakan di Badan POM, pergantian pejabat, *press release*, *public warning*, profil unit kerja, dan profil pejabat. Pada tahun 2016, Biro Kerjasama Luar Negeri telah menerbitkan *Drug and Food Control Newsletter* sebanyak 3 edisi kali sebanyak 1500 eksemplar per edisi (tercapai 100%) dan didistribusikan kepada mitra kerja Badan POM yaitu perwakilan RI di luar negeri, perwakilan asing di Indonesia, organisasi internasional, instansi pemerintah RI, universitas, *National Regulatory Authority (NRA)* negara lain dan lingkungan Badan POM pusat dan daerah. Kendala yang dihadapi adalah terlambatnya artikel dari unit kerja, beban kerja yang tinggi sehingga penulis artikel atau editor tidak dapat hadir pada saat pembahasan artikel, membuat terlambatnya penerbitan dan pengiriman *newsletter* tersebut. Terkait dengan hal ini, Biro Kerjasama Luar Negeri telah mengevaluasi kegiatan ini dan dihasilkan rekomendasi untuk membuat jadwal atau perencanaan dan meningkatkan komitmen penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan pembahasan sesuai dengan perencanaan.
14. Kegiatan Workshop isu-isu kerjasama Regional mengangkat mengenai isu TPP dan kerjasama APEC. Penyelenggaraan workshop sebanyak 2 kali melibatkan narasumber antara lain dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan target kinerja adalah jumlah workshop yang

diselenggarakan sebanyak 2 workshop dan sudah terlaksana 2 kali workshop dengan 2 dokumen pembahasan (Realisasi tercapai 100%).

15. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Agreement TBT-WTO bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait penerapan *TBT Agreement* serta sebagai wadah koordinasi antara pemerintah dengan swasta dalam menanggapi isu-isu hambatan teknis perdagangan di Bidang Obat dan Makanan. Output kegiatan ini adalah Pemahaman peserta tentang implementasi *TBT Agreement* meningkat utamanya mengenai hak dan kewajiban terhadap notifikasi draft/rancangan regulasi teknis di Bidang Obat dan Makanan serta Tersedianya wadah koordinasi antara Badan POM dan pelaku usaha dalam menanggapi isu-isu hambatan teknis perdagangan. Sosialisasi diselenggarakan sebanyak 1 kali melibatkan narasumber antara lain dari Kementerian Perdagangan dan Badan Standardisasi Nasional dan dihadiri oleh perwakilan unit Badan POM, dan asosiasi industri obat dan makanan (Realisasi tercapai 100%).
16. Kegiatan Sosialisasi isu-isu kerjasama Organisasi Internasional diselenggarakan sebanyak 3 kali dengan mengangkat tema *Genetic Resource and Traditional Knowledge and Floklor* (GRTKF), isu kerjasama kemasan pangan dan kerjasama *International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines* (IRCH) yang melibatkan narasumber antara lain dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian dan dihadiri oleh perwakilan unit Badan POM (Realisasi tercapai 100%).
17. Kegiatan Sosialisasi visi *ASEAN Economic Community* (AEC) Post 2015 diselenggarakan sebanyak 1 kali melibatkan narasumber antara lain dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh perwakilan unit Badan POM, kementerian terkait dan pelaku usaha (Realisasi tercapai 100%).
18. Workshop Badan POM-Negara Mitra mengangkat isu kerjasama Badan POM dengan *Virje University* (VU), Belanda dan *The Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS), Korea. Narasumber berasal dari VU dan MFDS dan dihadiri oleh perwakilan unit teknis Badan POM. Output dari kegiatan ini adalah mengimplementasikan kerjasama VU dibidang pendidikan, pelatihan dan penelitian serta kerjasama dengan MFDS

dibidang pertukaran informasi dan *best practices* di bidang pengawasan obat dan makanan. (Realisasi tercapai 100%).

19. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana tindak lanjut kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri dan kegiatan.
20. Kegiatan pemenuhan alat pengolahan data Biro Kerjasama Luar Negeri berupa *personal computer* ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan mengingat core bisnis di Biro Kerjasama Luar Negeri adalah penyusunan kajian, telaah, dokumen/kertas posisi dan perjanjian kerjasama luar negeri.
21. Selain *personal computer*, juga diperlukan peralatan perkantoran berupa perekam suara digital yang melaksanakan kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri yang banyak berhubungan dengan mitra luar negeri dengan menggunakan bahasa asing.

EFISIENSI

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa *angka capaian efisiensi tahun lalu*, *angka capaian efisiensi instansi lain* untuk kegiatan yang sama, atau *angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target*, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah *angka capaian efisiensi* sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Output}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

IE kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan/kerugian negara antara lain :

- Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode peralatan dan sebagainya.
- Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

Pada tahun 2016, Biro Kerjasama Luar Negeri telah melaksanakan 22 kegiatan. Dari seluruh kegiatan telah berhasil mencapai tingkat efisiensi sampai 2,541. Hal ini menunjukkan hampir seluruh kegiatan yang ada telah efektif dan efisien pelaksanaannya

karena perencanaan yang baik dan tata kelola keuangan yang proporsional. Sebagai gambaran berikut ini adalah kegiatan yang tingkat efisiennya cukup tinggi.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi atau serapan anggaran Biro Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2016 mencapai Rp. 4.349.840.144,- dari anggaran sebesar Rp.5.340.000.000 atau sebesar 81,46% tanpa *self bloking* atau dari anggaran Rp.4.597.330.000 atau sebesar 94,62% dengan *self bloking*. Hal ini menunjukkan peningkatan serapan anggaran dibandingkan serapan tahun 2015 yaitu 89,45%. Serapan anggaran belum optimal, hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu:

Faktor Internal:

- a. Kurangnya kemampuan personil dalam membuat perencanaan, sehingga perencanaan yang belum baik;
- b. Kurangnya personil karena terdapat kegiatan yang bersamaan sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- c. Kurangnya kemampuan personil dalam pengelolaan anggaran, dan banyaknya kegiatan yang menggunakan mekanisme uang persediaan sehingga kegiatan belum dapat dilakukan karena uang belum tersedia.

Faktor External:

- a. Banyaknya undangan atau kegiatan dari unit teknis atau antar kementerian yang bersamaan.
- b. Adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan perubahan atau penundaan kegiatan yang memerlukan revisi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan.

Biro Kerjasama Luar Negeri merupakan unit penunjang BPOM, yang dituntut untuk dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Biro Kerjasama Luar Negeri juga dituntut untuk melakukan kajian-kajian terhadap potensi kerjasama luar negeri dengan negara-negara mitra maupun kerjasama dalam lingkup yang lebih besar seperti regional dan multilateral.

Sebagai upaya mendukung peningkatan hubungan dan kerjasama luar negeri tersebut Biro Kerjasama Luar Negeri melakukan penajakan hubungan bilateral dengan instansi terkait di negara mitra, penyusunan kertas posisi/dokumen posisi dan partisipasi dalam forum internasional, persiapan penyelenggaraan pertemuan internasional, koordinasi dengan instansi lintas sektor/ interkementerian sampai dengan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri berupa pelayanan administrasi dokumen perizinan perjalanan dinas luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kerjasama Luar Negeri berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016, menyajikan capaian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2016. Capaian kinerja tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan masih dalam kategori “Baik”. Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif unit kerja teknis terkait.

Secara keseluruhan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Biro Kerjasama Luar Negeri telah terlaksana dengan baik dan mencapai persentasi capaian kinerja yang baik. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran sehingga visi dan misi Badan POM dapat diwujudkan melalui penyesuaian pencapaian sasaran yang ada dalam Renstra dengan QMS, peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terpenuhinya sarana prasarana dan pemberdayaan SDM sehingga tercapai profesionalitas kerja secara dinamis.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri bagi peningkatan kinerja dimasa datang antara lain adalah:

1. Menyusun sistem informasi hubungan dan kerjasama luar negeri Badan POM untuk membangun *instution knowledge* sehingga pejabat yang berkepentingan dapat memperoleh informasi data kerjasama yang komprehensif dan terkini. Hal ini penting dalam menyusun posisi kerjasama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan Badan POM khususnya dalam membangun kemitraan dan jejaring kerjasama dengan stakeholder terkait.
2. Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM) di Biro KSLN dalam membuat perencanaan dengan melibatkan semua SDM yang ada
3. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Quality Management System (QMS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Untuk meningkatkan implementasi RB, QMS dan SPIP diperlukan beberapa komponen seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pelaksanaan ketiga hal tersebut. Antara lain meningkatkan komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan meningkatkan kompetensi pengelolaan anggaran.

IV.2. Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersediasserta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.

2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

Akhir kata, kami berharap LAKIP 2016 Biro Kerjasama Luar Negeri dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.